



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ *MAJOR PROJECT*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS / MAJOR PROJECT
PADA PRIORITAS NASIONAL RKP 2023**

Prioritas Nasional / Major Project		Rp. Juta
01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
1	Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas	387.895,8
2	Destinasi Pariwisata Prioritas	1.848.385,1
3	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	103.008,1
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	199.161,2
5	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	294.520,7
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	251.191,7
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional	42.185,0
8	<i>Food Estate</i> (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	235.469,9
9	Pengelolaan Terpadu UMKM	1.275.211,6
02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
10	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	568.544,3
11	Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	2.298.302,5
12	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	23.561.214,0
13	Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	3.289.473,4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / Major Project		Rp. Juta
14	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	3.198.874,0
15	Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	353.244,3
16	PKSN Kawasan Perbatasan Negara	414.537,5
17	Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)	75.516,3
03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
18	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	81.058.268,4
19	Pembangunan <i>Science Techno Park</i> (Optimalisasi <i>Triple Helix</i> di 4 <i>Major</i> Universitas)	456.591,6
20	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	702.742,7
21	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	142.669.775,7
22	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	12.050.020,9
05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
23	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	100
24	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	424.630,7
25	Kereta Api Makassar-Pare Pare	477.051,9
26	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	533.057,7
27	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar	1.711.455,5
28	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	346,7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / Major Project		Rp. Juta
29	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	362.938,7
30	Transformasi Digital	16.790.852,4
31	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	1.371.381,0
32	18 Waduk Multiguna	263.290,3
33	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	385.879,9
34	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	1.080.075,7
35	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	1.993.799,5
36	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)	2.592.070,8
37	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	3.777.912,1
38	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	1.527.938,7
39	Pemulhan 4 DAS Kritis	308.063,9
41	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	(dibiayai oleh investasi badan usaha)
42	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)	(dibiayai oleh investasi badan usaha)
06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
42	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	184.299,6
43	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	1.620.330,6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional / Major Project		Rp. Juta
07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
44	Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	330.658,8
45	Penguatan Keamanan Laut di Natuna	166.897,9

Catatan:

- (1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) *Major Project*;
- (2) Pada beberapa *Major Project* dilaksanakan melalui dukungan pendanaan dari BUMN/Swasta/Daerah, sehingga belanja K/L hanya sebagai fasilitator. Contoh: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung), Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, termasuk *Major Project* terkait pengembangan kewilayahan;
- (3) Major Project mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- (4) Proyek DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman